VOL. 9 No. 9,Juni 2010

ISSN : 1693-8305

Fakultas Bisnis & Manajemen
Universitas Widyatama

Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2000

JURNAL BISNIS, MANAJEMEN & EKONOMI

Bob Foster
Pengaruh Kinerja Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Loyalitas Nasabah Penabung (Suatu Survei di Bank Central Asia Cabang Soekarno-Hatta Bandung)|

Kanaidi Dan Suparno
Analisis Service Quality, Satisfaction, Trust, Dan Reputation Terhadap Custumer Loyalty (Survei Terhadap Konsumen Jasa Logistik PT Pos Indonesia (Persero)

Iwa Garniwa Dan Tezza Adriansyah Anwar
Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Melanjutkan Studi Ke Program Mangister Manajemen Universitas Widyatama

Sri Dewi Anggadini
Analisis Fee Based Income Dampaknya Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia(Persero). Tbk

Roni Habibi, Supriady, Dan Kanaidi
Analisis Model Laboratorium Komputer Thient Client Untuk Praktikum Pada Politeknik Pos Indonesia

Dini Arwati
Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Ditinjau Dari Penerapan Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi UMKM)

Lilis Puspitawati Dan Eva Andriyani
Peranan Pengungkapan Informasi Dalam Meningkatkan Praktik Good Corporate Governance

J.Bisnis,Manaj. Ekon.	Vol.9	No. 9	Hal. 2196-2308	Bandung Juni 2010	ISSN:1693-8305

PERANAN PENGUNGKAPAN INFORMASI DALAM MENINGKATKAN PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(Studi Kasus pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung)

Oleh:
Lilis Puspitawati, SE.,M.Si
Eva Andriyani, SE
Universitas Komputer Indonesia- Bandung.

Abstract

The purpose of this research is to find out an information disclosure at PT Pos Indonesia (Persero) Bandung, the practice of good corporate governance, and to find out about the role of information disclosure to incrase the practice of good corporate governance at PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.

The method use in this research is the analytical descriptive method with the quantitative approach and to find out the role of information disclosure to incrase the practice of good corporate governance used statistic test. The statistic test that used in this research is spearman's rank, determination coefficient, hypothesis testing, and also the application of SPSS 12.0 for windows that was used to strengthening the calculation manually.

Based of the calculation of the correlate coefficient was obtained, assuming that the relation of the information disclosure to the practice of corporate governance has a strong relation and unidirectional. weather the relation of information disclosure to the practice of good corporate governance is 68% ,and the rest of it is 32% influence by other factor like the human resource, corporate culture and the intern control system. The t test product showed that the information disclosure has a significant influence to the practice of good corporate governance or in other words the hypothesis by researcher means that therole of the information disclosure in renders the practice of good corporate governance was proofed.

Key Words: Information Disclosure, Good Corporate Governance

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setelah mengalami krisis ekonomi beberapa tahun lalu, kondisi perekonomian Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan pesat, maka sebagai konsekuensinya makin banyak masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks, sehingga keadaan ini menuntut para pemimpin atau manajemen perusahaan agar dapat mengelola perusahaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam era reformasi, masalah keterbukaan informasi sudah merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keterbukaan dan

pengungkapan (*transparency and disclosure*) merupakan salah satu prinsip *good corporate governance* (GCG) yang saat ini mendapat sorotan publik. Pada saat ini masyarakat atau publik memerlukan keterbukaan atau pangungkapan informasi, terutama bagi perusahaan yang sudah go publik. Para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat, seimbang dan kontinyu. Informasi biasanya dikategorikan atas dua hal, yaitu informasi finansial dan non-finansial. Informasi finansial yang utama terdapat pada laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan interim (*interim report*), biasanya berupa laporan tengah tahunan dan laporan triwulanan. Informasi non-finansial difokuskan pada masalah pengungkapan (*disclosure*) risiko potensial (*potential risk*) yang dihadapi perusahaan saat ini serta alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut.

Pangungkapan informasi perusahaan perlu dilakukan secara berimbang, informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif namun termasuk informasi yang bersifat negatif. Ini untuk menghindari adanya informasi yang salah (*disinformasi)* serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham maupun *stakeholders* lainnya. Beberapa kasus perbankan, antara lain akibat adanya disinformasi yang disampaikan kepada publik, informasi dan laporan keuangan yang dilaporkan yang baik-baik saja meski sudah diaudit oleh eksternal auditor. Akibatnya, banyak bank bangkrut dan terpaksa ditutup atau dilikuidasi pemerintah.

Untuk dapat mengelola perusahaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajer akan menghadapi masalah karena kompleksnya kegiatan perusahaan. Hal ini membuat manajemen perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan tidak dapat secara langsung mendelegasikan sebagian tugasnya, wewenang dan tanggung jawab yang dipikulnya kepada pihak lain untuk mengontrol aktivitas perusahaan.

Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer. Istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh danmenguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Prinsip GCG ini, yaitu *fairness, transparancy, accountability, Indepnedency* dan *responsibility*

Salah satu cara mengelola perusahaan yang baik, yaitu menerapkan *good corporate governance.* Tuntunan terhadap terwujudnya *good corporate governance disektor publik maupun swasta baik dinegara internasioanal maupun* di Indonesia semakin penting. Tuntutan ini adalah hal wajar karena telah berbagai penelitian yang mengemukakan bahwa terjadinya krisis ekonomi pada Negara Asia, khususnya di Indonesia karena adanya *bad governance* dari pelaku-pelaku ekonomi. Hal ini dapat dilihat melalui suatu penelitian pada skor peringkat *corporate governance* di Negara Asia mengemukakan bahwa Negara Indonesia skornya 8,29 berada pada urutan ke-9 dari 11 negara di Asia (sumber:www.lib.unair.ac.id)

Dari fenomena diatas diketahui bahwa Indonesia mendapatkan urutan ke-9 dari 11 negara di Asia karena perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mempunyai tata kelola perusahaan yang baik. *Good corporate governance*

didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. *Good Corporate Governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien transparans, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan transparansi.

Fenomena yang terjadi beberapa tahun yang lalu, sewaktu terungkapnya berbagai skandal dunia korporasi seperti yang terjadi di *Enron, Tyco,* dan *Worldcom* di Amerika, *Parmalat* di Italia, *HIH Insurance* di Australia, atau *bank global* di Indonesia yang melibatkan adanya aktivitas pembayaran dan pengadaan yang tidak wajar, investasi yang tidak patut, kasus korupsi dan suap, serta masalah yang lainnya. Skandal tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi investor dan publik pada umumnya. Perusahaan yang terlihat sehat dan informasi keuangannya yang menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, ternyata tidak lebih rekayasa pelaporan dan pengungkapan. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian yang ada dalam perusahaan dan menyebabkan perusahaan tidak dikelola secara efisien, sehingga secara jangka panjang berpengaruh pada rendahnya kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Ditambah lagi dengan masih minimnya pengungkapan informasi yang disampaikan kepada publik mengenai kinerja dan efektivitas perusahaan, sehingga banyak inefiensi yang tidak tertangkap pada laporan keuangan dan catatan penjelasannya, serta berujung pada menurunnya kepercayaan investor terhadap integritas informasi keuangan yang diungkapan perusahaan (www.governance-Indonesia.com)

Pemerintah yang tidak luput dari program perbaikan tata laksana perusahaan yang baik. Hal tersebut dilakukan karena fenomena yang terjadi pada tahun 2002 lalu, BUMN yang memiliki asset senilai Rp 924 triliun, dan ratusan triliun tersebut diperoleh laba setelah pajak sebesar 26,9 triliun, sementara Return On Assets (ROA) rata-rata sebesar 2,86 % dan Return On Equity (ROE) rata-rata sebesar 10,2 %. (sumber : www.sinarharapan.co.id)

Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa untuk meningkatkan tata kelola perusahaan BUMN telah diterapkan *good corporate governance,* tetapi dilihat dari hasilnya masih belum maksimal dinyatakan demikian karena hal tersebut dilihat dari laba setelah pajak, ROA dan ROE yang dihasilkan belum maksimal. Menurut para ahli ekonomi hal tersebut dikarenakan akan sistem pengawasan yang belum maksimal dalam menunjang penerapan *good corporate governance* pada perusahaan BUMN.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, PT Pos Indonesia (Persero) Bandung sebagai salah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan usahanya dibidang dagang dan jasa menyelenggarakan pelayanan bisnis komunikasi, bisnis keuangan, bisnis filateli. Perusahaan ini telah memberikan pelayanan keseluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar Negara.

Dari pengamatan, diketahui PT Pos Indonesia Bandung saat ini mengalami permasalahan dalam hal keterbukaan informasi dimana kasus korupsi di PT Pos

yang terkait pemberian komisi kepada pelanggan berawal dengan adanya Surat Edaran Direktur Operasional PT Pos No:41/DIROP/0303 tanggal 20 Maret 2003 yang memberi komisi antara tiga sampai lima persen kepada pelanggan. Namun penerapan pemberian komisi diberlakukan secara berbeda oleh Kepala Kanwil Kantor Pos IV Jakarta yaitu lima sampai enam persen. Selain itu dari hasil pengusutan Kejagung didapati bukti kwintasi tanda terima fiktif dari pelanggan yang seolah-olah uang komisi benar-benar diterima pelanggan. Padahal uang itu diterima sejumlah oknum pegawai PT Pos Indonesia, artinya PT Pos Indoensia belum menerapakan pengungkapan informasi dengan baik.

Transparan mengandung makna segala aktivitas yang dilakukan, informasi yang dimiliki, dapat diketahui dan dicermati oleh orang/pihak lain. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan tak ada yang menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh sekelompok orang. Transparan menuntut kejelasan siapa berbuat apa dan bagaimana melakukannya. Karena itu, setiap mendapat sebuah penugasan hendaknya pelaku dalam perusahaan memahami benar apa yang menjadi tanggung jawabnya serta menyampaikan proses dan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Beberapa penelitian yang secara khusus menguji hubungan antara struktur *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi telah dilakukan oleh Forker (1992), Ho dan Wong (2000), dan Sabeni (2002) dalam Khomsiyah(2003). Pentingnya penelitian mengenai *Corporate Governance* dan pengungkapan informasi dapat ditinjau dari dua perspektif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance,* mengingat pentingnya peran *Corporate Governance* dalam struktur pengelolaan bisnis dan ekonomi moderen yang ditopang oleh pasar modal dan pasar uang (Witherell, 2000; Oman, 2001 dalam Khomsiyah, 2003),.

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul mengenai: Peranan Pengungkapan Informasi Dalam Meningkatkan Praktik *Good Corporate Governance* pada PT POS INDONESIA (Persero) Bandung"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Pengungkapan Informasi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung
2. Bagaimana pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung
3. Seberapa besar peranan Pengungkapan Informasi Dalam Meningkatkan Praktik *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pengungkapan Informasi

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan berbeda dalam kondisi yang berbeda pula. Sebagian salah satu prinsip dalam akuntansi keuangan, istilah pengungkapan dikaitkan secara langsung dengan laporan keuangan. Pada kenyataannya ternyata pengungkapan juga berhubungan dengan informasi

lainnya diluar laporan keuangan. Pengungkapan merupakan suatu alat yang penting untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dengan pemilik perusahaan

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

"Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statement".

Menurut Wolk, Tearney, dan Dodd dalam Suwardjono (2001 : 452), pengungkapan informasi adalah:

"Berkaitan dengan informasi baik dalam statemen keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statemen, diskusi dan analisis manajemen, prakiraan keuangan dan operasi, dan statemen keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari kos historis".

2.1.1.1 Jenis Pengungkapan

Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku

2.1.1.2 Tujuan Pengungkapan

menurut **Suwardjono** (2004 : 580)tujuan pengungkapan yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Melindungi
   Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naïf perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya. Dengan kata lain pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan kurang terbuka.
2. Tujuan Informatif
   Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.
3. Tujuan Kebutuhan Khusus
   Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada public dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang memuat pengungkapan secara rinci.

2.1.1.3 Tingkatan Pengungkapan

Menurut **Hendriksen dan Breda** (2000 : 432) terdapat tiga tingkatan pengungkapan yaitu

1. Pengungkapan Penuh
2. Pengungkapan Cukup
3. Pengungkapan Wajar

2.1.2 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance dapat dipahami dari beberapa dari beberapa sudut pandang *The Cadbury Committee* dalam **Hiro Tugiman** (2004:3)merumuskan :

> *"Good Corporate Governance* adalah sistem yang dirancang untuk mengarhkan dan mengendaliakan perusahaan, struktur *Corporate Governance* (1) partisipan dalam perusahaan seperti dewan direksi, komisaris, pemegang saham dan stakeholders lainnya (2) menetapkan berbagai aturan dan prosedur dalam membuat keputusan mengenai perusahaan".

Menurut KEP-117/M-MBU/2002 pengertian *Good Corporate Governance* mengenai praktik *good corporate governance* adalah :

> *"Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika".

Setelah definisi serta aspek penting *Good Corporate Governane* terpaparkan di atas, maka berikut adalah prinsip yang dikandung dalam *Good Corporate Governane* Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam KEP-117/M-MBU/2002 mengenai praktik *good corporate governance* ini meliputi: *Fairness* (Kewajaran), *Transparency* (Keterbukaan), *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), Kemandirian *(independency)*

Pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan praktek *Good Corporate Governane* yaitu : Pemegang Saham, Dewan Komisaris (BOC), Pimpinan Perusahaan/Direksi (BOD), Pimpinan Unit, Pejabat Struktural, Pegawai.

Adapun unsure-unsur (*person incharge*) dalam *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

1. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham
2. Komisaris dan Direksi
3. Komite Audit
4. Sekretaris Perusahaan
5. Manajer dan Karyawan
6. Auditor Eksternal
7. Auditor Internal
8. *Stakeholder* lainnya

2.1.3 Hubungan Pengungkapan Informasi dan Praktik *Good Corporate Governance (GCG)*

Hubungan antara pengungkapan informasi dengan praktik *good corporate Governance.* Penelitian ini 15 orang bagian *Good Corporate Governane* PT Pos Indonesia Bandung sebagai sampel. Penelitian yang dilakukan Khomsiyah (2003) menunjukkan terdapat hubungan antara pengungkapan informasi dengan praktik *good corporate governance* dalam laporan perusahaan. Semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan semakin bagus praktik *good corporate governance.* Hal ini sesuai dengan keinginan regulator, dalam hal ini adalah BAPEPAM, yang mendorong diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang akan meningkatkan perlindungan bagi pihak investor dengan adanya informasi yang diberikan oleh perusahaan.

Menurut Wolk, Tearney, dan Dodd dalam Suwarjono (2001), Pengertian Pengungkapan Informasi Berkaitan dengan informasi baik dalam statemen keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statemen, diskusi dan analisis manajemen, prakiraan keuangan dan operasi, dan statemen keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari kos historis.

Pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangn da kinerja perusahaan.

Penelitian **Ho dan Wong (2000)** dalam **Khomsiyah (2003)** menunjukkan bahwa

> Indonesia, Thailand dan Jepang yang mempunyai tingkat transparansi yang rendah, merupakan negara yang mengalami *volatile shocks* yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang mempunyai transparansi yang lebih tinggi (Hongkong, Singapura dan Taiwan).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pangungkapan informasi perusahaan perlu dilakukan secara berimbang, informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif namun termasuk informasi yang bersifat negatif. Ini untuk menghindari adanya informasi yang salah (*disinformasi)* serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham maupun *stakeholders* lainnya. Beberapa kasus perbankan, antara lain akibat adanya disinformasi yang disampaikan kepada publik, informasi dan laporan keuangan yang dilaporkan yang baik-baik saja meski sudah diaudit oleh eksternal auditor. Akibatnya, banyak bank bangkrut dan terpaksa ditutup atau dilikuidasi pemerintah.

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan. **Evans (2003)** dalam **Suwardjono (2005)** (2003:331) mengartikan pengungkapan sebagai berikut :

> *"Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statement".*

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM No:Kep-40/PM/2003. sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi yang diwajibkan.

Pertimbangan manajemen untuk mengungkapakan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya. Menurut Veronika dan Bachtiar mengatakan bahwa :

"Sesungguhnya manajemen atau pembuat laporan keuangan memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan penuh dalam laporan keuangannya, namun ada beberapa hambatan bagi pembuat laporan keuangan untuk melakukan pengungkapan penuh. Salah satunya adalah pertimbangan biaya pengungkapan."

Menurut Wolk, Tearney, dan Dodd dalam Suwardjono (2001:452), pengungkapan informasi adalah:

"Berkaitan dengan informasi baik dalam statemen keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statemen, diskusi dan analisis manajemen, prakiraan keuangan dan operasi, dan statemen keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari kos historis".

Pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* diterapkan didalam perusahaan, lembaga keuangan berskala besar membuat kebijakan dalam pendanaan perusahaan-perusahaan melalui pinjaman atau pemberian modal perusahaan dengan mulai memasukkan syarat-syarat pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan yang didanainya tersebut. Kebijakan ini dilakukan sebagai usaha pengawasan yang semakin tajam dari pemegang saham dalam menanamkan investasinya. Dalam hal ini Negara-negara dengan standar *corporate governance* yang rendah akan semakin dikucilkan dari daftar Negara-negara dimana dana internasional diizinkan untuk melakukan investasi.

Menurut KEP-117/M-MBU/2002 pengertian *Good Corporate Governance* mengenai praktik *good corporate governance* adalah :

"*Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika".

Menurut Mas Ahmad Daniri (2005;8), *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai berikut :

"*Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu pola hubungan sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkeseimbangan dalam jangka panjang panjang dengan tetap

memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem pengawasan, pengendalian, dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antar berbagai pihak yang mengurus perusahaan dari mulai komitmen, aturan maen serta praktik penyelanggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

Setelah definisi *Good Corporate Governane* terpaparkan di atas, maka berikut adalah prinsip yang dikandung dalam *Good Corporate Governane*. Menurut KEP-117/M-MBU/2002 prinsip utama *Good Corporate Governane* yaitu:

1. *fairness,* perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
2. *transparency,* keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
3. *accountability*, kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertangungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. *Independency*, perusahaan harus mampu berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.
5. *responsibility*. kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha dan kegiatan perusahaan keaarah peningkatan pertumbuhan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Penerapan *corporate governance* (pengelolaan perusahaan) yang baik akan menciptakan intensif internal bagi manajemen perusahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien, sehingga mendorong kepercayaan investor, dan masuknya arus modal yang dapat mendorong pulihnya perekonomian baik secara makro maupun mikro.

Menurut Susanto, 1992, hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam penerapan *Corporate Governance,* karena seharusnya perusahaan dengan struktur kepemilikan masyarakat yang tinggi memiliki tekanan yang lebih tinggi untuk pengungkapan informasi yang lebih baik jika perusahaan dengan kepemilikan masyarakat lebih besar akan memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak dengan alasan untuk memasarkan sahamnya.

Menurut Suwardjono, 2005, asumsi dasar yang menghubungkan faktor ukuran perusahaan dan pengungkapan informasi adalah pengungkapan memerlukan *cost* yang tinggi, sehingga perusahaan besar seharusnya lebih mampu menyediakan pengungkapan informasi yang lebih baik. Alasan lainnya adalah perusahaan besar memiliki hubungan eksternal yang lebih luas dan berkepentingan dengan banyak pihak, baik itu pemerintah, investor asing, bank internasional dan sebagainya. Hal ini yang menekan perusahaan besar untuk meningkatkan kualitas transparansi dalam pemberian informasi.

Menurut **Khomsiyah (2003)** menunjukkan bahwa :

"Terdapat hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi perusahaan. Semakin baik praktik *Good Corporate Governance*, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan".

Porter yang dialih bahasakan oleh Ratna Wardani (1991) menyatakan bahwa alasan mengapa perusahaan sukses atau gagal mungkin lebih disebakan oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kesuksesan perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut di antaranya juga mencakup strategi sistem penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan.

2.3 Hipotesis

Hipotesis diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menetapkan kesimpulan sementara.Sugiyono (2009: 64), menjelaskan pengertian hipotesis sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Bedasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah, di atas penulis mengemukakan hipotesis:

"Pengungkapan Informasi berperan dalam meningkatkan praktik *good corporate governance*"

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Husein Umar (2003: 303), menjelaskan pengertian dari objek penelitian sebagai berikut:

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu."

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Informasi dan Praktik *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian mengacu kepada desain penelitian yang telah dibuat.

Sugiyono (2008:13), menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

"1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian

6. Menyusun instrument penelitian
7. Kesimpulan".

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel merupakan proses penguraian variabel penelitian ke dalam subvariabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasioanlisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor. Operasional variabel pada penelitian ini dijelaskan pada tabel 3.2 halaman 21

3.2.3. Sumber Data dan Teknik Penentuan Data

3.2.3.1. Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti pada penelitian mengenai peranan pengungkapan informasidalam meningkatkan praktik *good corporate governance* adalah data primer **Teknik Penentuan Data**

Teknik penentuan data dalam penelitian ini menggunakan populasi untuk menentukan obyek atau subyek yang memiliki karakteristik tertentu.

Populasi yang diambil oleh peneliti adalah bagian good corporate governance 15 orang, jadi populasi yang digunakan sebanyak 15 orang. Populasi yang ada pada penelitian ini relatif kecil, jadi peneliti mengunakan penarikan sampel dengan metode sensus.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap pengendalian internal perusahaan ada beberapa langkah, antara lain dengan penelitian lapangan seperti observasi, kuesioner dan wawancara, serta *searcing* (internet).

3.2.5 Rancangan Analisis

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Analisis data diperlukan agar peneliti dapat memperoleh hasil yang dapat dipercaya. Data yang dihimpun dari hasil penelitian akan peneliti bandingkan antara data yang ada di lapangan dengan teori yang relevan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif.

1. Metode Deskriptif

Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta yang ada. Metode deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertanyaan pertama dan kedua, dengan cara memberi peringkat pada masing-masing variabel dengan menggunakan persentase skor aktual.

sebagaimana Umi narimawati (2007: 84) menjelaskan sebagai berikut:

Skor aktual

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan :

a. skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.
b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

2. Analisis korelasi (*Rank Spearman*)

Analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan untuk menyatakan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat , maka digunakan korelasi.

Korelasi *Rank Spearman* dapat dirumuskan dengan:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n^3 - n}$$

Keterangan : r_s = korelasi *rank spearman*
d^2 = selisih antara X dan Y
n = jumlah sampel yang diambil

Sebagai pedoman untuk memberikan interpretasi, peneliti menggunakan satuan angka-angka yang dapat dilihat pada tabel 4.17 halaman 26

3. Pengujian Koefisien Determinasi (KD)

Untuk mengetahui besarnya sumbangan atau peranan variabel X dan variabel Y, dapat dihitung dengan rumus koefisien determinasi, Jonathan (2006: 50) menjelaskan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$KD = r_s^2 \times 100\%$$

Dimana :
KD = Koefisien Determinasi
r_s = Koefisien Korelasi

4. Pengujian Hipotesis

Guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan memiliki pengaruh atau tidak, maka dilakukan uji t.

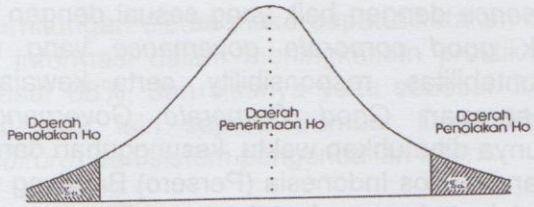
Sugiyono (2009: 184) menjelaskan rumus untuk menguji t sebagai berikut:

$$t = \frac{rs\sqrt{n-2}}{\sqrt{1 - rs^2}}$$

1. Membandingkan t_{tabel} dan t_{hitung} dengan kriteria:

$t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
$t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Pada penelitian ini dilakukan uji dua pihak karena hipótesis yang telah ditetapkan menyatakan variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y, jadi belum terlihat apakah variabel X dapat meningkatkan variabel Y atau tidak. Uji dua pihak menurut Sugiyono (2009: 163) dapat dilihat pada gambar 3.1



Gambar 3.1
Uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipótesis

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengungkapan Informasi pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 15 orang pegawai pada bagian *good corporate governance*

Tanggapan responden terhadap pengungkapan informasi adalah sebesar 89.42 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi di PT Pos Indonesia (Persero) Bandung adalah sangat baik dimata responden. Baiknya penilaian responden disebabkan oleh beberapa hal penting yang mampu diperhatikan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Bandung, yaitu adanya pengungkapan penuh, adanya pengungkapan cukup serta adanya pengungkapan wajar/memadai yang nilai sudah baik.

Adapun tanggapan responden yang paling baik terhadap faktor-faktor Pengungkapan Informasi adalah faktor pengungkapan informasi secara penuh. Hal ini terjadi karena Pengungkapan penuh mengacu pada seluruh informasi yang diberikan oleh perusahaan, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Pengungkapan penuh tidak hanya meliputi laporan keuangan tetapi juga mencakup informasi-informasi lainnya yang diberikan oleh manajemen dengan adanya pengungkapan informasi mengenai perushaan secara relevan, adanya informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, serta pihak manajemen perusahaan dapat menyiratkan suatu tujuan etika, yaitu memberikan perlakuan yang sama pada semua karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Bandung. Untuk mengetahui hasil tanggapan responden diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

4.2. Praktik *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban

responden yang diisi oleh 15 orang pegawai pada bagian *good corporate governance.*

Tanggapan responden terhadap *Good Corporate Governance* adalah sebesar 90,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* di PT Pos Indonesia (Persero) Bandung adalah baik dimata responden. Hal ini karena PT Pos Indonesia (Persero) Bandung dapat menerapakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik yang sesuai dengan KEP-117/M-MBU/2002 mengenai praktik *good corporate governance* yang meliputi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, responsibility, serta kewajaran. Guna menjamin keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* dalam arti yang sebenarnya, tentunya dibutuhkan waktu, kesungguhan dan komitmen kuat semua pihak di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) Bandung untuk menjalankannya. Hal-hal dibawah ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak agar tujuan penerapan *Good Corporate Governance* dapat tercapai, yaitu:

a. Menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasanoperasional
b. Menjadikan setiap individu sebagai penggerak penerapan *Good Corporate Governance*
c. Mensosialisasikan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan di seluruh tingkatan satuan kerja
d. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*
e. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara professional, transparan dan efisien dengan memberdayakan fungsi dan kemandirian Organ Perusahaan

4.3. Peranan Pengungkapan Informasi dalam Meningkatkan *Praktik Good Corporate Governance*

Pengujian hipotesis digunakan untuk mebuktikan hipotesis dalam penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian kali ini adalah untuk membuktikan ada tidaknya peranan pengungkapan informasi (variabel *independent*) dalam meningkatkan praktik *good corporate governance* (variabel *dependent*). Untuk menguji hipotesis tersebut, maka peneliti melakukan beberapa langkah antara lain:

1. Pengujian Korelasi *Rank Spearman*

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas hasil data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis dihitung berdasarkan korelasi *Rank Spearman.* Adapun perhitungannya dapat menggunakan perhitungan manual atau dibantu dengan program *SPSS 12.0 For Windows.*

Dari hasil perhitungan korelasi dengan menggunakan *SPSS 12.0 for Windows* dapat dilihat pada tabel . halaman , bahwa $r_s = 0{,}825$, maka hubungan ini menurut Sugiyono (2009:184) termasuk hubungan dalam kriteria yang sangat kuat dan memiliki hubungan yang positif (+) atau searah.

2. Pengujian Koefisien Determinasi (KD)

Besarnya peranan pengungkapan informasi (variabel X) terhadap praktik *good corporate governance* dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi (Kd), dengan rumus sebagai berikut:

$KD = 0{,}825^2 \times 100\%$
$= 0{,}680 \times 100\%$
$= 68\ \%$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat dikatakan bahwa besarnya peranan pengungkapan informasi dalam meningkatkan praktik *good corporate governance* adalah sebesar 68%, dan sisanya yaitu sebesar 32% (100%-68%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti Sumber Daya Manusia, budaya perusahaan (*corporate culture*) dan sistem pengendalian intern.

3. Uji Statistik

Uji Statistik yang digunakan adalah uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r_s\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}825\sqrt{15-2}}{\sqrt{1-(0{,}825)^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{1.545}{0.319}$$

$$t_{hitung} = 4.843$$

Dimana : Jika t_{hitung} > dari t_{tabel}, maka H_0 ditolak, H_1 diterima

Jika t_{hitung} < dari t_{tabel}, maka H_0 diterima, H_1 ditolak

Dengan taraf signifikansi α=0,05 dan dk=15-2= 13 mak t_{tabel}= 1,771, jadi t_{hitung}= 4.843 > t_{tabel}=1,771, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya Pengungkapan Informasi berperan terhadap *Good Corporate Governance*.

Dari hasil semua pernitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan Informasi mempunyai korelasi yang kuat dan positif (+) terhadap *Good Corporate Governance*, ditunjukkan oleh angka hasil korelasi yang sangat kuat yaitu sebesar 0,825. Ini berarti bahwa apabila Pengungkapan Informasi diterapkan dengan baik dan berhasil, maka *Good Corporate Governance* juga akan meningkat seiring dengan pengungkapan informasi tersebut.

Dari hasil pengujian diatas diketahui bahwa peranan pengungkapan informasi dalam meningkatkan praktik *good corporate governance*, dinyatakan dengan perhitungan korelasi sebesar 0,825 dimana kategori ini termasuk dalam kategori yang sangat kuat dan positif. Pengaruh positif menunjukkan bahwa peranan pengungkapan informasi dalam meningkatkan praktik *good corporate governance* adanya searah, artinya apabila pengungkapan informasi baik maka praktik *good corporate governance* baik

Dari perhitungan koefisien determinasi besarnya peranan pengungkapan informasi dalam meningkatkan praktik *good corporate governance* adalah sebesar 68%, sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak

diteliti oleh penulis seperti sumber daya manusia, budaya perusahaan dan sistem pengendalian intern.

Sedangkan dalam uji hipotesis menggunakan uji t dengan nilai t hitung sebesar 4,843 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,771 dan hal ini berarti bahwa penelitian menerima hipotesis "pengungkapan informasi berperan dalam meningkatkan praktik *good corporate governance"* dan menolak hipotesis "pengungkapan informasi berperan dalam meningkatkan praktik *good corporate governance"* atau berdasarkan hasil perhitungan uji t dapat disimpulkan bahwa pengungkapan informasi berperan dalam meningkatkan praktik *good corporate governance* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.

peranan pengungkapan informasi dalam meningkatkan praktik *good corporate governance* pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandun ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi perusahaan. Semakin tinggi praktik *Good Corporate Governance*, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pengungkapan Informasi pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan PT Pos Indonesia (Persero) Bandung mampu memperhatikan beberapa poin penting untuk Pengungkapan Informasi yang baik yaitu Pengungkapan secara penuh, Pengungkapan secara cukup dan Pengungkapan secara wajar atau memadai. Poin penting tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh PT Pos Indonesia (Persero) Bandung sehingga Pengungkapan Informasi dapat berhasil dan sukses.
2. Praktik *Good Corporate Governance* di PT Pos Indonesia (Persero) Bandung sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Bandung yaitu, kewajaran, transparansi, akuntabilitas, responsibility dan kemandirian.
3. Pengungkapan informasi berperan dalam meningkatkan praktik *good corporate governance* ditunjukkan oleh besarnya t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel}. Pengungkapan informasi memiliki hubungan yang sangat kuat dan searah, artinya jika Pengungkapan Informasi PT Pos Indonesia (Persero) Bandung baik maka praktik *good corporate governance* pun baik dan juga sebaliknya apabila pengungkapan informasi tidak baik maka praktik *good corporate governance* pun tidak akan berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, dimana pengungkapan Informasi terbukti mempengaruhi *good corporate governance*, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung sebagai berikut:

1. Pihak manajemen perusahaan harus lebih meningkatkan lagi mengenai pengungkapan informasi perusahaan dan meningkatkan praktik good corporate governance.
2. Untuk para karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Bandung diharapkan dapat melaksanakan praktik *good corporate governance* sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik.
3. PT Pos Indonesia (Persero) Bandung hendaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan agar pelanggan merasa puas dengan pelaanan yang telah diberikan

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat 2006. *Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Pustaka

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta:Salemba Empat.

Jonathan Sarwono. 2003. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Unikom

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTEK *GOOD CORPORATEGOVERNANCE* PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Khomsiyah. 2003. "Hubungan *Corporate Governance* dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan".

Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

Mas Ahmad Daniri. 2005. *GCG: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia

Moh. Nasir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nur Indrianto, Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE

Sugiyono. 2006. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFE.

Yunita Heryani Mintara. 2008. Pengungkapan: Studi Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Informasi

www.governance-Indonesia.com

www.lib.unair.ac.id